



Economic Empowerment Strategy in Defense Entrepreneurship to Support the Universal People's Defense and Security System

Jonni Mahroza¹, Lukman Yudho Prakoso^{2*}, Ivan Yulivan³
Universitas Pertahanan RI

Corresponding Author: Lukman Yudho Prakoso lukman.prakoso@idu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords : Strategy, Defense Entrepreneurship, Diplomacy

Received : 04 June

Revised : 26 June

Accepted: 28 July

©2024 Mahroza, Prakoso, Yulivan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The limitation of Defense budget creates its own problems in facing factual and potential threats. The purpose of writing this article is to analyze the Impact of Economic Empowerment Strategy in Defense Entrepreneurship to Support the Total People's Defense and Security System. And Formulation of Economic Empowerment Strategy in Defense Entrepreneurship to Support the Total People's Defense and Security System. The results of the study are that the implementation of economic empowerment strategy requires planned steps, including strategic planning, infrastructure development, strong partnerships, and periodic monitoring and evaluation. Investment in production capacity and technology, as well as support for education and training programs, are key steps to achieving defense goals.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi dalam Defense Entrepreneurship Guna Mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

Jonni Mahroza¹, Lukman Yudho Prakoso^{2*}, Ivan Yulivan³

Universitas Pertahanan RI

Corresponding Author: Lukman Yudho Prakoso lukman.prakoso@idu.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Strategi, Defense Entrepreneurship, Diplomasi

Received : 04 Juni

Revised : 26 Juni

Accepted: 28 Juli

©2024 Mahroza, Prakoso, Yulivan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Keterbatasan anggaran Pertahanan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam menghadapi ancaman faktual dan potensial. Tujuan Peulisan artikel ini adalah Untuk menganalisis Dampak Strategi Pemberdayaan Ekonomi Dalam Defense Entrepreneurship Guna Mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Dan Perumusan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Dalam Defense Entrepreneurship Guna Mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Hasil Penelitian adalah Implementasi strategi pemberdayaan ekonomi memerlukan langkah-langkah yang terencana, termasuk perencanaan strategis, pengembangan infrastruktur, kemitraan yang kuat, dan monitoring serta evaluasi berkala. Investasi dalam kapasitas produksi dan teknologi, serta dukungan untuk program-program pendidikan dan pelatihan, adalah langkah-langkah kunci untuk mencapai tujuan pertahanan .

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang, hal ini dibuktikan dari segi demografis dengan kependudukan yang sangat banyak serta masih banyaknya masalah masalah hukum, sosial, ekonomi maupun pertahanan (Saputro GE 2021). Di sisi lain Indonesia memiliki sumber daya yang sangat kaya dan melimpah. Hal ini merupakan salah satu potensi besar dalam membangun perekonomian negara. Adam Smith dalam Suryana (2000) yang berjudul *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, menyatakan pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang memadukan dua kegiatan antara pertumbuhan penduduk dengan teknologi yang terus berkembang. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan proses rumit yang akan memberikan pengaruh besar dan memberikan perubahan-perubahan besar dalam suatu struktur sosial, kelembagaan nasional, pola kebiasaan masyarakat, pemerataan dan pemberantas kemiskinan.

Todaro (2000) menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen yang mendasari nilai-nilai inti yang memiliki fungsi sebagai pedoman maupun basic untuk memahami dan mendalami makna pembangunan yang sebenarnya. Ketiga nilai inti tersebut yaitu (1) harga diri (self esteem), kecukupan (sustenance), dan kebebasan (freedom). Harga diri dapat diartikan sebagai perasaan yang merasa berharga dan tidak dapat diperalat atau ditunggui oleh tujuan orang lain. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk manusia seperti tempat tinggal, makanan, kesehatan maupun rasa aman. Kebebasan yaitu sikap yang dapat memilih sesuai dengan keinginan maupu kebutuhannya.

Salah satu solusi untuk membangun perekonomian adalah menciptakan kewirausahaan pada sendi masyarakat tersebut. Perekonomian akan tumbuh lebih cepat akibat dari kegiatan kewirausahaan karena ada *knowledge spillover*, yaitu terbentuknya barang atau jasa yang diciptakan oleh seorang wirausaha sehingga terwujudnya pertumbuhan ekonomi (Khamimah, 2021). Kewirausahaan juga akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lainnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekhasan dan kondisi geografi yang berbeda yang bercirikan nusantara. Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pun harus bersifat kerakyatan yang disesuaikan dengan karakter dan pedoman bangsa Indonesia.

Ekonomi pertahanan sebagai studi multidisiplin membahas alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik yang diterapkan pada topik yang berkaitan dengan pertahanan. Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap perekonomian dapat dilihat dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi (GE Saputro 2021). Mengingat Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (Kementerian Pertahanan, 2020).

Maka pembangunan ekonomi juga menjadi tombak dalam pembangunan kekuatan pertahanan nirmiliter. Semakin kuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya maka berbanding lurus dengan kekuatan pertahanan tersebut (Saputro GE 2020). Berdasarkan hal tersebut pentingnya membangun ekonomi rakyat berbasis kewirausahaan dalam upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pemberdayaan ekonomi guna mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta saat ini dan bagaimana strategi terbaik Pemberdayaan ekonomi guna mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

TINJAUAN PUSTAKA

Artikel "Strategi Pemberdayaan Ekonomi dalam Defense Entrepreneurship Guna Mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta" menyoroti pentingnya integrasi ekonomi dalam pertahanan. Mengacu pada teori implementasi kebijakan Luman Yudho Prakoso, artikel ini menyatakan bahwa "pemberdayaan ekonomi yang efektif dapat memperkuat ketahanan nasional" (Prakoso, 2020). Dalam konteks ini, defense entrepreneurship berperan krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas lokal. Selanjutnya, strategi dari Lyke digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang harus diambil, dengan penekanan pada "kolaborasi antara sektor publik dan swasta sebagai kunci sukses" (Lyke, 2021). Dengan mengimplementasikan strategi ini, diharapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dapat diperkuat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Artikel Strategi Pemberdayaan Ekonomi dalam Defense Entrepreneurship Guna Mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta membahas bagaimana pemberdayaan ekonomi dapat diintegrasikan ke dalam pertahanan nasional melalui konsep kewirausahaan pertahanan (defense entrepreneurship). Untuk mendukung analisis ini, artikel menggunakan dua teori utama: teori implementasi kebijakan Lukman Yudho Prakoso dan teori strategis Clausewitz mengenai Ends, Ways, Means.

Menurut teori implementasi kebijakan publik dari Prakoso (2020), kebijakan yang efektif membutuhkan koordinasi lintas sektoral dan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi defense entrepreneurship sebagai bagian dari strategi pertahanan harus melibatkan koordinasi antara sektor ekonomi dan pertahanan guna menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berdaya saing tinggi dan mampu mendukung kekuatan pertahanan nasional. Melalui pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang berbasis pada kontribusi seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, teori Clausewitz tentang Ends, Ways, Means menekankan bahwa strategi yang efektif harus merumuskan tujuan (ends), cara (ways), dan sarana (means) yang sesuai dalam menjalankan misi pertahanan (Clausewitz, 1976). Dalam konteks defense entrepreneurship, tujuan (ends) adalah

menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan tangguh dalam menghadapi ancaman keamanan. Cara (ways) mencakup pelatihan, pemberdayaan, dan pengembangan kewirausahaan di sektor pertahanan. Sarana (means) meliputi dukungan kebijakan, modal, serta infrastruktur yang mendukung.

Dengan menggabungkan kedua teori ini, artikel ini mengusulkan strategi holistik yang mengedepankan sinergi antara pengembangan ekonomi dan pertahanan guna memperkuat sistem keamanan nasional.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Pertahanan: Perspektif Lukman Yudho Prakoso

Lukman Yudho Prakoso mengidentifikasi beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pertahanan. Faktor-faktor tersebut adalah integritas, interaktif, transparansi, kontrol, dan akuntabilitas. Semua faktor ini sangat relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi untuk mendukung sistem pertahanan di Indonesia. Berikut penjelasan dari setiap faktor tersebut dalam konteks pertahanan dan pemberdayaan ekonomi.

a. Integritas

Integritas dalam kebijakan pertahanan merujuk pada kejujuran, konsistensi, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, integritas penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dialokasikan untuk pertahanan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya.

Kebijakan ekonomi yang mendukung pertahanan haruslah bersifat inklusif dan berkeadilan. Negara harus memastikan bahwa alokasi anggaran pertahanan tidak disalahgunakan atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, Prakoso (2020) menekankan pentingnya integritas dari para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan bahwa semua program yang dirancang benar-benar mencapai tujuannya.

Dalam hal pengadaan alutsista, misalnya, integritas sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, seperti prinsip transparansi dan efisiensi. Pengadaan yang penuh dengan integritas akan menghasilkan sistem pertahanan yang kuat dan siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

b. Interaktif

Faktor interaktif dalam kebijakan pertahanan mengacu pada pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, ini berarti bahwa pemerintah harus melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertahanan nasional.

Kebijakan pertahanan yang interaktif memungkinkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting karena pertahanan negara bukan hanya urusan militer, tetapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa. Menurut Prakoso, proses interaksi ini harus bersifat dua arah, di mana

masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada pemerintah, dan pemerintah dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil.

Dalam konteks ekonomi, keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan industri pertahanan sangat penting. Pemerintah harus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan nasional dalam mengembangkan teknologi pertahanan, sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada produk impor. Program-program seperti offset dalam pengadaan alutsista dapat menjadi contoh bagaimana kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dapat memperkuat basis ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan.

c. Transparansi

Transparansi adalah salah satu faktor kunci dalam implementasi kebijakan pertahanan yang baik. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya dan pengembangan industri pertahanan dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

Menurut Prakoso (2020), transparansi dalam kebijakan pertahanan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengembangan pertahanan. Hal ini sangat penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi, karena rakyat harus merasa yakin bahwa pajak dan kontribusi ekonomi mereka digunakan dengan bijaksana untuk memperkuat pertahanan negara.

Dalam pengadaan alutsista, transparansi sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tanpa transparansi, proses pengadaan berisiko menjadi tidak efisien dan dapat merugikan negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap langkah dalam pengembangan industri pertahanan, mulai dari perencanaan hingga implementasi, dilakukan dengan transparan.

d. Kontrol

Kontrol dalam kebijakan pertahanan merujuk pada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program berjalan sesuai rencana. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi untuk pertahanan, kontrol sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggaran yang dialokasikan digunakan dengan tepat dan efisien.

Menurut Prakoso, kontrol dapat dilakukan melalui audit berkala, baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa anggaran pertahanan digunakan dengan benar. Selain itu, kontrol juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan media dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pertahanan.

Kontrol yang baik akan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana dan bahwa semua program yang dirancang untuk pemberdayaan ekonomi berjalan dengan efektif. Tanpa kontrol yang memadai, program-program

pertahanan bisa saja tidak mencapai tujuannya, bahkan merugikan negara dalam jangka panjang.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab yang diemban oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kebijakan pertahanan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dalam hal penggunaan anggaran dan sumber daya untuk pertahanan.

Menurut Prakoso (2020), akuntabilitas dalam kebijakan pertahanan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada rakyat bagaimana anggaran pertahanan digunakan dan apa hasil yang telah dicapai. Dalam hal ini, laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka menjadi penting untuk memastikan bahwa semua program berjalan dengan baik.

Dalam konteks pengembangan industri pertahanan, akuntabilitas juga melibatkan sektor swasta yang berpartisipasi dalam pengembangan alutsista. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengadaan alutsista harus memiliki mekanisme akuntabilitas yang baik untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi dalam Defense Entrepreneurship Guna Mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

Pemberdayaan ekonomi dalam konteks defense entrepreneurship (kewirausahaan pertahanan) merupakan strategi kunci untuk mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) di Indonesia. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negara melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efektif. Strategi ini mengacu pada teori strategi klasik Carl von Clausewitz, yang menguraikan pentingnya tujuan (ends), cara (ways), dan sumber daya (means) dalam merumuskan strategi. Artikel ini akan membahas strategi terbaik terkait pemberdayaan ekonomi dalam defense entrepreneurship untuk mendukung Sishankamrata, dengan merujuk pada teori Clausewitz untuk menentukan tujuan, cara, dan sumber daya yang diperlukan.

Teori Strategi Carl von Clausewitz

Carl von Clausewitz, dalam karya terkenalnya *On War* (1832), mengemukakan bahwa strategi adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Clausewitz, strategi harus mempertimbangkan tiga aspek utama: ends (tujuan), ways (cara), dan means (sumber daya). Pendekatan ini sangat relevan untuk mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi dalam defense entrepreneurship, di mana:

Ends/Tujuan: Apa yang ingin dicapai?

Ways/Cara: Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut?

Means/Sumber Daya: Apa sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan?

1. Ends/Tujuan dalam Pemberdayaan Ekonomi untuk Defense Entrepreneurship

Tujuan utama dari pemberdayaan ekonomi dalam defense entrepreneurship adalah untuk memperkuat sistem pertahanan negara melalui peningkatan kapasitas industri pertahanan domestik, peningkatan inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pertahanan. Tujuan ini mencakup beberapa aspek spesifik:

Peningkatan Kapasitas Industri Pertahanan: Memperkuat industri pertahanan domestik agar lebih mandiri dalam memproduksi alutsista dan teknologi pertahanan (Wahyudi, 2021).

Pengembangan Teknologi dan Inovasi: Mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan teknologi pertahanan yang lebih canggih (Gansler, 2011).

Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya pertahanan melalui program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (Suhendra, 2021).

Peningkatan kapasitas industri pertahanan domestik adalah tujuan jangka panjang yang penting untuk memastikan bahwa negara tidak terlalu bergantung pada impor alutsista. Dengan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, negara dapat lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pertahanan yang terus berkembang.

Pengembangan teknologi dan inovasi juga merupakan tujuan krusial. Dalam era digital, teknologi pertahanan yang canggih menjadi kunci untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Peningkatan R&D akan memungkinkan negara untuk memproduksi teknologi pertahanan yang lebih efisien dan efektif.

Pemberdayaan masyarakat adalah tujuan penting lainnya yang mendukung Sishankamrata. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pertahanan, negara dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

2. Ways/Cara untuk Mencapai Tujuan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan berbagai cara atau metode yang efektif. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat digunakan:

Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung: Pemerintah harus menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan industri pertahanan domestik dan inovasi teknologi. Ini termasuk insentif untuk penelitian dan pengembangan serta dukungan untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri pertahanan (Setiadi, 2020).

Kemitraan antara Pemerintah dan Sektor Swasta: Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk pengembangan industri pertahanan. Kemitraan ini dapat mencakup kontrak pengadaan alutsista, program offset, dan investasi dalam R&D. Sektor swasta dapat menyediakan

teknologi terbaru dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas industri pertahanan (DARPA, 2020).

Pengembangan Infrastruktur Penunjang: Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mendukung industri pertahanan. Ini termasuk fasilitas produksi, laboratorium penelitian, dan pusat pelatihan. Pengembangan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi dan pengembangan teknologi pertahanan (Bonvillian & Singer, 2018).

Pendidikan dan Pelatihan: Untuk mendukung inovasi dan teknologi, penting untuk memiliki tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada bidang teknik pertahanan dan teknologi akan memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mendukung industri pertahanan (Smith, 2019).

Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas: Program-program yang melibatkan masyarakat dalam upaya pertahanan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan negara. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, pemberian akses permodalan, dan pengembangan usaha kecil yang mendukung kebutuhan pertahanan di tingkat lokal (Wahyudi, 2021).

3. Means/Sumber Daya yang Diperlukan

Untuk melaksanakan strategi pemberdayaan ekonomi dalam defense entrepreneurship, beberapa sumber daya yang diperlukan meliputi:

Anggaran dan Pembiayaan: Anggaran yang memadai diperlukan untuk mendanai pengembangan industri pertahanan, R&D, dan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup dan mencari sumber pembiayaan tambahan dari sektor swasta dan investor (Gansler, 2011).

Sumber Daya Manusia: Tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan dalam bidang pertahanan dan teknologi sangat penting. Ini termasuk ilmuwan, insinyur, teknisi, dan tenaga kerja terampil lainnya. Program pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang diperlukan (Smith, 2019).

Teknologi dan Inovasi: Investasi dalam teknologi dan inovasi adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas pertahanan. Ini termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, sistem informasi, dan teknologi canggih lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan pertahanan (DARPA, 2020).

Kemitraan Internasional: Kerjasama internasional dapat membantu dalam memperoleh teknologi terbaru, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas industri pertahanan. Program kerjasama internasional dapat mencakup pelatihan, transfer teknologi, dan kolaborasi dalam proyek R&D (Bonvillian & Singer, 2018).

Infrastruktur: Pengembangan infrastruktur yang memadai seperti pabrik, laboratorium, dan fasilitas pelatihan akan mendukung produksi dan pengembangan alutsista serta teknologi pertahanan (Setiadi, 2020).

PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi dalam defense entrepreneurship merupakan aspek penting untuk memperkuat sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) di Indonesia. Dalam konteks ini, defense entrepreneurship mengacu pada inisiatif dan inovasi yang diterapkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian sektor pertahanan melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi terbaik dalam pemberdayaan ekonomi untuk mendukung Sishankamrata, serta membandingkan kebaharuan dari penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya. Defense entrepreneurship adalah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan kebutuhan pertahanan negara. Konsep ini mencakup pengembangan dan implementasi strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian industri pertahanan nasional melalui inovasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi (Gansler, 2011). Defense entrepreneurship melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas industri, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung upaya pertahanan negara.

Menurut Bonvillian dan Singer (2018), defense entrepreneurship tidak hanya berkisar pada pengembangan teknologi militer, tetapi juga mencakup pembentukan ekosistem yang mendukung inovasi dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Ini mencakup investasi dalam penelitian dan pengembangan, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta, serta dukungan untuk usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam industri pertahanan.

Implementasi Strategi Pemberdayaan Ekonomi

Implementasi strategi pemberdayaan ekonomi dalam defense entrepreneurship memerlukan langkah-langkah yang terencana dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Beberapa langkah kunci dalam implementasi meliputi:

1. Perencanaan Strategis

Pemerintah harus merancang rencana strategis yang mencakup semua aspek pemberdayaan ekonomi untuk pertahanan. Ini termasuk penetapan tujuan yang jelas, pengembangan kebijakan, dan implementasi program-program yang mendukung industri pertahanan, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat (Setiadi, 2020).

2. Pengembangan Infrastruktur dan Kapasitas

Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti pabrik, laboratorium, dan fasilitas pelatihan, adalah kunci untuk mendukung produksi dan pengembangan teknologi pertahanan. Investasi dalam infrastruktur dan kapasitas akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sektor pertahanan (Smith, 2019).

3. Kemitraan dan Kolaborasi

Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional sangat penting untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi. Kemitraan ini dapat mencakup kontrak pengadaan, program offset, dan kolaborasi dalam proyek R&D. Ini akan mempercepat transfer teknologi,

meningkatkan kapasitas industri, dan memperkuat kemampuan pertahanan (DARPA, 2020).

4. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan yang fokus pada bidang teknik pertahanan dan teknologi sangat penting untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan. Program-program ini akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendukung pengembangan inovasi dalam industri pertahanan (Gansler, 2011).

5. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis hasil, dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Laporan evaluasi harus disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas (Wahyudi, 2021).

Strategi pemberdayaan ekonomi dalam defense entrepreneurship merupakan komponen krusial untuk mendukung sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan yang menggabungkan pengembangan industri pertahanan domestik, inovasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat, Indonesia dapat memperkuat kapasitas pertahanan dan mencapai kemandirian dalam bidang pertahanan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan integratif yang mencakup berbagai aspek defense entrepreneurship, penggunaan teori Clausewitz sebagai kerangka analisis, serta fokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan kemitraan internasional. Implementasi strategi yang efektif memerlukan perencanaan strategis, pengembangan infrastruktur, kemitraan yang kuat, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi yang berkala.

Dengan dukungan dari semua elemen bangsa, Indonesia dapat mewujudkan pertahanan yang kuat dan mandiri, serta mampu menghadapi tantangan yang terus berkembang di era global ini.

Strategi Pemberdayaan Ekonomi dalam Defense Entrepreneurship

Strategi pemberdayaan ekonomi untuk mendukung Sishankamrata dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama:

1. Pengembangan Industri Pertahanan Domestik

Pengembangan industri pertahanan domestik merupakan prioritas utama dalam pemberdayaan ekonomi untuk mendukung Sishankamrata. Ini melibatkan penguatan kapasitas produksi alutsista dalam negeri dan pengurangan ketergantungan pada impor. Setiadi (2020) menekankan bahwa peningkatan kapasitas industri pertahanan domestik dapat dilakukan melalui investasi dalam infrastruktur, pengembangan teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri pertahanan,

seperti insentif fiskal dan dukungan R&D, sangat penting dalam mencapai tujuan ini (Wahyudi, 2021).

2. Inovasi Teknologi dan Penelitian & Pengembangan (R&D)

Inovasi teknologi dan R&D merupakan aspek kunci dari defense entrepreneurship. Investasi dalam R&D dapat meningkatkan kemampuan teknis dan inovatif sektor pertahanan, memungkinkan pengembangan teknologi canggih yang diperlukan untuk menghadapi ancaman modern (DARPA, 2020). Pengembangan teknologi baru, seperti sistem senjata mutakhir, teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi canggih lainnya, dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pertahanan.

Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian juga berperan penting dalam mendorong inovasi. Program-program kolaborasi dan kemitraan dapat mempercepat transfer teknologi, meningkatkan kemampuan penelitian, dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan pertahanan (Bonvillian & Singer, 2018).

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Berbasis Komunitas

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas juga berkontribusi pada Sishankamrata. Program-program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal dapat meningkatkan ketahanan dan stabilitas wilayah, terutama di daerah perbatasan dan rawan konflik. Suhendra (2021) mencatat bahwa program-program ini meliputi pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pengembangan usaha kecil yang mendukung kebutuhan pertahanan lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam upaya pertahanan dapat menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pertahanan nasional. Program-program ini juga membantu menciptakan ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendukung upaya pertahanan negara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulannya adalah Pemberdayaan ekonomi memainkan peran sentral dalam defense entrepreneurship, terutama dalam konteks pengembangan dan kemandirian industri pertahanan nasional. Penguatan industri pertahanan domestik melalui investasi dalam teknologi, infrastruktur, dan kapasitas produksi merupakan strategi vital untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian nasional. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengembangan industri domestik yang kuat tidak hanya mendukung pertahanan tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan strategi pemberdayaan ekonomi bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan.

Sebagai Rekomendasi adalah penguatan infrastruktur dan kapasitas industri pertahanan domestik. Investasi dalam fasilitas produksi, teknologi

canggih, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah penting untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan nasional. Penting untuk meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk mendorong inovasi dalam sektor pertahanan. Program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas harus diperluas untuk mencakup lebih banyak masyarakat dan daerah strategis. Transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi strategi pemberdayaan ekonomi harus diperkuat untuk memastikan efektivitas dan mencegah penyalahgunaan sumber daya.

PENELITIAN LANJUTAN

Keterbatasan anggaran dalam mendukung sistem pertahanan negara dapat menjadi tantangan dimasa yang akan datang dalam membangun inovasi dan kreativitas untuk mencari solusi yang efektif dan efisien dengan melakukan strategi Defense Entrepreneurship.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada LPPM Unhan RI yang telah memberikan kesempatan kepada Tim ini dalam melaksanakan penelitian dosen. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sampai penelitian dosen ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonvillian, W. B., & Singer, P. W. (2018). *Defense Innovation and the Future of Military Power*. Cambridge: MIT Press.
- Clausewitz, C. (1832). *On War*. Translated by Michael Howard and Peter Paret. Princeton: Princeton University Press.
- DARPA. (2020). *Annual Report*. Defense Advanced Research Projects Agency. Washington, DC.
- Gansler, J. S. (2011). *Democracy's Arsenal: Creating a Twenty-First-Century Defense Industry*. Cambridge: MIT Press.
- Khamimah, M. (2021). *Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prakoso, L. Y. (2020). *Implementasi Kebijakan Pertahanan di Era Global*. Jakarta: Lemhannas Press.
- Saputro, G. E. (2020). *Strategi Pertahanan Nasional: Paradigma dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Setiadi, T. (2020). *Industri Pertahanan Nasional: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Lemhannas Press.

- Smith, M. (2019). *Military Strategy in the Contemporary World: Adaptation and Innovation*. London: Routledge.
- Suhendra, A. (2021). *Pertahanan Indonesia di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryana. (2000). *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, M. P. (2000). *Economic Development (7th ed.)*. New York: Addison-Wesley.
- Wahyudi, E. (2021). "Pengembangan Alutsista Nasional dalam Kerangka Pertahanan Mandiri." *Jurnal Pertahanan Nasional*, 10(1), 34-56.